

**KEPUTUSAN TUN TENTANG REKLAMASI DALAM PERSPEKTIF HAK
KONSTITUSI WARGA NEGARA INDONESIA
(Studi Kasus Putusan Nomor 92 K/TUN/LH/2017)**

SKRIPSI

Oleh:

**IRHAM SALEH
NPM : 201410115103**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi

: KEPUTUSAN TUN TENTANG REKLAMASI
DALAM PERSPEKTIF HAK KONSTITUSI
WARGA NEGARA (Studi Kasus Putusan Nomor
92 K/LH/TUN/2017)

Nama Mahasiswa

: Irham Saleh

Nomor Pokok Mahasiswa

: 201410115103

Program Studi/Fakultas

: Ilmu Hukum / Hukum




Nina Zainab, SH., MH.
NIP 011606055


Ndaru Satrio, SH.,MH
NIP 011606050

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi

: KEPUTUSAN TUN TENTANG REKLAMASI
DALAM PERSPEKTIF HAK KONSTITUSI
WARGA NEGARA (Studi Kasus Putusan Nomor
92 K/LH/TUN/2017)

Nama Mahasiswa

: Irham Saleh

Nomor Pokok Mahasiswa

: 201410115103

Program Studi/Fakultas

: Ilmu Hukum / Hukum



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : KEPUTUSAN TUN TENTANG REKLAMASI DALAM PERSPEKTIF HAK KONSTITUSI WARGA NEGARA (Studi Kasus Putusan Nomor 92 K/LH/TUN/2017)

Nama Mahasiswa : Irham Saleh

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115103

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Juli 2018

Bekasi, 30 Juli 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Pengaji : Herybertus Soekartono, SH, MH

NIP 019909008

Pengaji I : Adi Nur Rohman, SHI, MAg

NIP 011507040

Pengaji II : Ndaru Satrio, SH, MH

NIP 011606050


.....
.....
.....
.....

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Dekan

Fakultas Ilmu Hukum



Elfirda Ade Putri, SH., MH
NIP 011512043



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH.,MH.
NIP 1804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul “*Keputusan TUN Tentang Reklamasi dalam Perspektif Hak Konstitusi Warga Negara Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No: 92 K/LH/TUN/2017)*”.

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengijinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui perpustakaan Univeristas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan Skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikan melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 30 Juli 2018

Yang membuat pernyataan

METERAI
TEMPEL

16EA5AFF094184986

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Irham Saleh

NPM 2014 1011 5103

ABSTRAK

Irham Saleh, 201410115103, Skripsi. “Keputusan TUN Tentang Reklamasi Dalam Perspektif Hak Konstitusi Warga Negara Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 92 K/TUN/LH/2017)”.

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini mempunyai dua tujuan . pertama, Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus terhadap perkara Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait pelaksanaan kegiatan reklamasi, Putusan MA Nomor: 92 K/TUN/LH/2017, dan yang kedua untuk mengetahui bagaimana unsur-unsur tentang AAUPB (*good governance*) dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam penerapan kewenangan Pemprov DKI Jakarta yang menjadi dasar dalam mengeluarkan Keputusan Kegiatan Reklamasi, dalam Putusan MA Nomor: 92 K/TUN/LH/2017.

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa, pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang kegiatan proses reklamasi belum mencerminkan rasa keadilan. Majelis hakim tidak melihat secara langsung secara faktual dilapangan. Akibat kegiatan reklamasi tersebut. Dan akibat yang muncul karena adanya kegiatan proses reklamasi tersebut sangat berdampak langsung pada Hak Konstitusi Warga Negara yang dilindungi oleh undang-undang.

Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan : “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar.” Menunjukkan bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat, dapat diartikan bahwa wujud demokrasi dalam penyelenggaraan negara tidak terbatas pada penentuan siapa yang duduk dalam kekuasaan negara melalui hak pilih rakyat yang menjadi hak konstitusional warga negara namun juga hak-hak yang diatur dalam konstitusi baik hak asasi maupun hak warga negara yang tidak dilanggar dan diabaikan oleh penyelenggara negara.

Kata Kunci: Kebijakan, Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Hak Konstitusi

ABSTRACT

Irham Saleh, 201410115103, Thesis. "*TUN Decision on Reclamation in Perspective of Constitutional Rights of Indonesian Citizen (Case Study of Supreme Court Decision Number 92 K / TUN / LH / 2017)*".

The Administrative Decision of the State is a written stipulation issued by a state administrative body or officer containing a state administrative law action which, in accordance with applicable law, concrete, individual and final, which gives rise to legal consequences for a person or legal entity civil. In connection with this, this study has two objectives. Firstly, to know how the judge's judgment in deciding on the case of TUN Decision issued by the Provincial Government of DKI Jakarta related to the implementation of reclamation activities, Supreme Court Decision Number 92 / KUN / LH / 2017, and second to know how elements about AAUPB (good governance) as well as the prevailing laws and regulations, in the application of the authority of the Provincial Government of DKI Jakarta which is the basis for issuing the Decision on Reclamation Activities, in the Supreme Court Decision Number 92 K / TUN / LH / 2017. Based on the results of the research stated that, judges' consideration in deciding the case about the reclamation process activities has not reflected the sense of justice. The judges did not look directly in fact in the field. Due to the reclamation activities. And the results that arise because of the activities of the reclamation process is very direct impact on the environment. In Article 1 Paragraph (2) of the 1945 Constitution states: "Sovereignty is in the hands of the people and carried out according to the Basic Law." To show that the people as the people's sovereign holders can mean that the form of democracy in the administration of the state is not limited to the determination of who sits in the power of the state through the right to vote of the people constituting the constitutional rights of the citizens but also the rights set forth in the constitution of both human rights and the rights of citizens who are not violated and ignored by state organizers.

Keyword: PTUN, *North coast of jakarta Reclamation, Constitutional rights*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan kasihNya yang selalu melimpah terhadap penulis ditengah perjuangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu dan tanpa hambatan yang berarti.

Penulisan skripsi ini, penulis memilih judul: “*Keputusan TUN Tentang Reklamasi Dalam Perspektif Hak Konstitusi Warga Negara Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 92 K/TUN/LH/2017)*”.

Skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan berbagai pihak. Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs.Bambang Karsono,S.H.,M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr.H.Erwin Owan Hermansyah, S.H.M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs.Koesparmono Irsanm S.H.,M.H.,M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas dan sedekat apa pun selalu membimbing dan memberikan pemikiran transformatif.
4. Nina Zainab S.H.,M.H., selaku Pembimbing I yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi, pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ndaru Satrio S.H.,M.H.,selaku Pembimbing II yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi, pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh civitas akademik yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-satu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
7. Kedua orang tua dan juga adik ku tercinta Octa Berliana dan abangku terhebat Hery Widodo, atas dukungan dan juga Do'a yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan dan juga memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai sesuai harapan penulis.
8. Keluarga Besar Bpk Wardiman dan keluarga, serta Fauziah Lestari yang selalu memberikan support dan Do'a untuk menyelesaikan tugas penulisan ini, disela sibuknya waktu bekerja.
9. Untuk teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran kepada penulis.

10. Untuk kawan seperjuangan pada saat test Calon Taruna, Febrika P Asmoro, yang selalu support dengan meluangkan waktunya untuk mencari referensi sampai keliling jakarta dan juga menjadi IT Support dikala Leptop Hang. Semoga menjadi Berkah.
11. Untuk rekan kerja Perdana F.N dan Zulfikar Anandri yang selalu memberikan Do'a dan juga kompensasi waktu disela kerja, untuk saya menyelesaikan skripsi ini.
12. Dan juga semua pihak yang telah mendukung skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dari sanalah semua kesuksesan ini berawal, semoga semua ini bisa memberikan sedikit kebahagiaan dan menuntun pada langkah yang lebih baik lagi. Meskipun penulis berharap isi dari skripsi ini bebas dari kekurangan dan kesalahan, Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Bekasi, 30 Juli 2018



Irham Saleh
201410115103



DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
MOTTO	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah.....	6
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	7
1.2.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	7
1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual,Kerangka Pemikiran.....	8
1.4.1 Kerangka Teori.....	8
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	11
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	13
1.5 Metode Penelitian.....	14
1.6 Metode Pengumpulan Data.....	15
1.7 Sistematika Penulisan.....	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Pengertian Tentang Peradilan TUN.....	19
2.1.1 Pengertian Keputusan TUN.....	18
2.1.2 Pengertian Pejabat TUN.....	18
2.1.3 Pengertian Sengketa Dalam Peradilan TUN.....	20
2.2 Sejarah dan Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara.....	21
2.2.1 Sejarah Peradilan Tata Usaha Negara.....	21
2.2.2 Tujuan Pengadilan Tata Usaha Negara.....	24
2.2.3 Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.....	25
2.2.4 Sumber Kewenangan dalam Tata Usaha Negara.....	29
2.3 Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang dan Ahli.....	30
2.3.1 Keputusan TUN Menurut Undang-undang.....	30
2.3.2 Keputusan TUN Menurut Ahli.....	32
2.4 Asas-Asas Dalam Peradilan Tata Usah Negara.....	35
2.5 Asas-asas Umum Tentang Pemerintahan Yang baik.....	36
2.6 Pengertian dan Tujuan Konstitusi.....	40
2.6.1. Pengertian Konstitusi.....	40
2.6.2. Hak Konstitusi Warga Negara.....	41
2.6.3. Tujuan dan Hakikat Konstitusi.....	43
2.7 Pengertian Reklamasi.....	45
BAB III HASIL PENELITIAN	47
3.1 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 193/G/LH/2015/Ptun-Jkt.	
3.1.1 Kasus Posisi.....	47
3.1.2 Identitas Para Pihak.....	49
3.1.3 Fundamentum Petendi/Posita.....	54
3.1.4 Petitum atau Permohonan Tuntutan.....	55
3.1.5 Pembuktian.....	56
3.1.6 Pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama.....	64
3.1.7 Amar Putusan.....	68

3.2 Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor :228 B/2016/Pt.Tun.Jkt.....	68
3.2.1 Pertimbangan Hakim Tingkat Banding.....	68
3.2.2 Amar Putusan.....	70
3.3 Putusan Hakim Tingkat Kasasi Nomor 92 K/LH/TUN/2017.....	71
3.3.1. Pertimbangan Hakim Tingkat Kasasi.....	71
3.3.2. Amar Putusan.....	72
3.3.3. Disenting Opinion.....	72
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	75
4.1 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara PTUN dengan Putusan Nomor 92 K/TUN/LH/2017 Tentang Kegiatan Reklamasi.....	75
4.1.1. Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama.....	77
4.1.2. Pertimbangan Hakim Tingkat Banding.....	89
4.1.3. Pertimbangan Hakim Tingkat Kasasi.....	91
4.2 Keputusan TUN Pemprov DKI Jakarta Tentang Reklamasi di Tinjau Dari Aspek AAUPB dan Hak Konstitusi Masyarakat.....	95
4.2.1. KTUN Pemprov DKI Jakarta tentang Reklamasi di Tinjau Dari Aspek AAUPB.....	95
4.2.2. KTUN Pemprov DKI Jakarta tentang Reklamasi di Tinjau Dari Aspek Hak Konstitusi Masyarakat.....	100
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	106
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LEMBAR BIMBINGAN 1

LEMBAR BIMBINGAN 2

MOTTO

*“Fiat justitia ruat caelum” Meskipun langit runtuh, kадilan harus
di tegakkan (Lucius Colpurnius Piso Caesonius)*

*Hargailah segala proses yang menempamu untuk menjadikanmu
seseorang yang hebat. Pendewasaan diri ditempa
dari seberapa seringnya kita mendapatkan cobaan
dikala proses itu berjalan. Bukan dari lamanya
kita hidup. dan semoga proses yang dilewati dan
dialami, mampu menjadikan kita seseorang yang
hebat dan memiliki sifat yang santun. Thanks for
everything mom. –Irham Saleh, SH-*



Kupersembahkan Skripsi ini untuk;

Orangtua Tercinta

Kakak dan Adik

Teman Hidupku

Almamaterku

dan Semua yang mengenal-KU

DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
MA	Mahkamah Agung
PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
PT	Pengadilan Tinggi
RKL	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup
AAUPB	Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
AMDAL	Analisis Dampak Lingkungan Hidup
RPL	Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
K	Kasasi

